



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pengadaan Barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA  
Marsha Alifia Hidayat, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.  
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## **PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA DENGAN CV ARKA JAYA**

Oleh: Marsha Alifia Hidayat<sup>1</sup>, Taufiq El Rahman<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pengadaan barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA serta penerapan asas proporsionalitas dalam penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Didukung dengan data primer yang didapatkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini didukung dengan wawancara kepada responden terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, dapat diambil (2) kesimpulan, *Pertama*, penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pengadaan barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA belum diterapkan dengan maksimal pada proses pembentukan perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan pendistribusian kewajiban bagi para pihak belum dapat terwujud secara adil. *Kedua*, penyelesaian permasalahan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan perjanjian antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA belum memenuhi asas proporsionalitas karena tidak diaturnya suatu ketentuan yang kemudian berdampak pada timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjiannya, sehingga hasil akhir dari penyelesaian permasalahan belum dapat menjamin dan melindungi pelaksanaan hak dan pendistribusian kewajiban para pihak secara proporsional dan layak, yang kemudian mengakibatkan kerugian terhadap pihak Penyedia.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Departemen Hukum Perdata, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



**THE IMPLEMENTATION OF PROPORTIONALITY PRINCIPLE IN GOODS  
PROCUREMENT CONTRACT BETWEEN INSTITUT SENI INDONESIA (ISI)  
SURAKARTA AND CV ARKA JAYA**

By: Marsha Alifia Hidayat<sup>1</sup>, Taufiq El Rahman<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This legal research aimed to determine and analyse the implementation of proportionality principle in goods procurement contract between Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta and CV ARKA JAYA as well as the application of the proportionality principle in resolving problems that arise during the execution of these contract.*

*This legal research is descriptive, empirical, and normative. Supported by primary data obtained through field studies and secondary data obtained through library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research is supported by interviews with related respondents. The data obtained in the study were analyzed qualitatively.*

*The result of this legal research yields 2 (two) conclusions, First, the implementation of the proportionality principle in goods procurement contract between Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta and CV ARKA JAYA has been not optimally implemented in both the contract formation and execution process. Consequently, the realization of rights and the distribution of obligations among the parties involved have not been achieved equally. Second, the problem resolution mechanism employed in the execution of contract between Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta and CV ARKA JAYA do not align adequately with the proportionality principle. This inadequacy arises from the absence of specific provisions, leading to issues during agreement execution. As a result, the final outcomes of problem resolution fail to ensure the proportional and fair exercise of rights and the equitable distribution of obligations among the parties, resulting in losses for the Provider.*

---

<sup>1</sup> Student of Civil Law Department, Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Lecturer in the Civil Law Department at the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.